

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen, dan lainnya 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada

Bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik, atau bahkan memburuk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya.

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 203

Kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan dan risiko yang terdapat pada bank syariah sendiri. Risiko pembiayaan yang dihadapi bank tidak selalu mudah diidentifikasi. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana, maupun kekurangsempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Risiko pembiayaan bisa terjadi secara langsung dalam pemberian *cash financing facility*, maupun secara tidak langsung dalam pemberian *non-cash financing facility*, seperti L/C dan garansi bank. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, rencana bisnis bank harus disusun secara komprehensif dan realistis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank, dan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang secara ketat diatur, diarahkan, dan diawasi Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) melalui PBI No. 12/21/PBI/2010 tentang “Rencana Bisnis Bank”, sementara untuk bank syariah serta unit usaha syariah dijabarkan dalam SEBI No. 12/32/DPbS/2010 tentang “Rencana Bisnis Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 2

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 46

Pada tahun 2007 pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat Rp 8 miliar menjadi Rp 22,4 miliar, dimana pengelolaan dana sosial berbasis zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ziswaf) mencapai Rp 18 miliar dan dana sosial berbasis *qard* (pinjaman) mencapai Rp 4,4 miliar. Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 35,7%, meningkat dibandingkan tahun 2006 sebesar 32,8%, sehingga kelompok nasabah UKM memiliki pangsa 68,2% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank syariah.<sup>5</sup>

Sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *Baitul Maal wat Tamwil*.<sup>6</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

---

<sup>5</sup> Hendri Hermawan, *Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardhul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*. Volume II, Nomor 2, Desember 2008, hal. 263-264

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 72

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.<sup>7</sup>

Pada masa sekarang, lembaga swadaya masyarakat *baitul maal wat tamwil* (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya. Melihat tujuan BMT tersebut, ada kesamaan tujuan lembaga BMT dengan tujuan lembaga koperasi. Sampai saat ini kelembagaan BMT sebagaimana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, belum diatur secara jelas. Dalam praktik, ada beberapa BMT yang mendirikan perhimpunan *Baitul Maal Wat Tamwil* Indonesia (BMT Center). Kemudian BMT Center ini menginisiasi dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, hal. 73-74

mengembangkan sebuah lembaga permodalan yang dinamakan PT Permodalan BMT untuk menjalankan fungsi *wholesaler* dan/atau *pool of fund*, termasuk disini adalah penjaminan.<sup>8</sup>

Agustiano (2008) memaparkan akar masalah yang sesungguhnya dari krisis keuangan yang selalu terjadi sepanjang sejarah, termasuk krisis keuangan saat ini yang bermula dari Amerika Serikat. Pertama, riba sebagai puncak krisis, kedua, kesenjangan antara sektor moneter dengan riil, dan yang ketiga, *maysir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>9</sup>

Terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1998 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya sektor ekonomi. Di tengah terpaan badai krisis tersebut perusahaan berskala menengah dan besar banyak yang kolaps. Sebaliknya, sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM) menunjukkan keperkasaannya, setidaknya tidak begitu terpengaruh oleh gonjang-ganjing krisis tersebut. Artinya, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT

---

<sup>8</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal. 6

<sup>9</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.

masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan '*profitable*'.<sup>10</sup>

Dari latar belakang itulah Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) atau BMT Istiqomah hadir. Dengan segala keterbatasannya Komsyah atau BMT Istiqomah ingin menjadi mitra bagi sektor UMKM yang tersebar di seantero Tulungagung. Setidaknya menjadi oase permodalan bagi mereka.<sup>11</sup>

BMT Istiqomah Karangrejo memiliki berbagai jenis produk pembiayaan dari pembiayaan yang berskala kecil hingga pembiayaan berskala besar. Pembiayaan yang ada antara lain adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan BBA (*Bai'bi Tsaman'Ajil*). Dari sekian produk pembiayaan yang ada, sebagian besar bertujuan untuk mengambil bagi hasil keuntungan dari pembiayaan yang telah diberikan. Namun disamping itu, BMT Istiqomah Karangrejo juga memiliki produk pembiayaan yang tidak mengambil keuntungan atas pinjaman yang diberikannya tersebut melainkan bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong yaitu pembiayaan dengan akad *qardh*, yang diberi nama pembiayaan *qardhul hasan*.

Pembiayaan *qardul hasan* ini tidak selamanya berjalan baik dengan yang diharapkan oleh pihak BMT, dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan yang ditimbulkan dari pembiayaan ini. Pada dasarnya, pembiayaan *qardhul hasan* ini bisa menggunakan agunan atau tidak

---

<sup>10</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 29

<sup>11</sup> *Profil BMT Istiqomah Karangrejo*

menggunakan agunan dalam proses pembiayaannya. Jadi, dampak yang ditimbulkan bisa berupa pembiayaan bermasalah karena pihak anggota tidak segera melunasi pinjamannya.

Dengan tidak mengesampingkan fungsinya sebagai lembaga komersil yang berorientasi pada keuntungan, BMT juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ketika memberikan fasilitas-fasilitas layanan kepada masyarakat. Ekspektasinya melalui penyaluran dan kebajikan kepada masyarakat yang membutuhkan, BMT dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan yang berprinsip tolong menolong. BMT Istiqomah Karangrejo sudah menjalankan fungsinya sebagai *Baitul Maal* dengan menghimpun infaq masyarakat yang dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan*, dimana dana yang telah dihimpun dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Dana *Qardhul Hasan* Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infaq</b>	<b>Sodaqoh</b>	<b>Jumlah</b>
2012	Rp -	Rp 6.645.890,00	Rp -	Rp 6.645.890,00
2013	Rp -	Rp 3.444.088,00	Rp -	Rp 3.444.088,00
2014	Rp -	Rp 7.844.167,00	Rp -	Rp 7.844.167,00
2015	Rp -	Rp 5.763.256,00	Rp -	Rp 5.763.256,00
2016	Rp -	Rp 5.791.512,00	Rp -	Rp 5.791.512,00

*Sumber: Buku RAT KPPS BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*

Melihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana *qardhul hasan* setiap tahunnya tidak sama. Perolehannya dipengaruhi oleh jumlah zakat, infaq, dan shodaqoh yang diberikan anggota maupun masyarakat umum kepada BMT. BMT Istiqomah Karangrejo mengalokasikan pembiayaan *qardhul hasan* pada beberapa sektor, diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid.

Dalam fungsi sosialnya BMT Istiqomah Karangrejo bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat menengah kebawah untuk keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat pendidikan dan lain-lain.

Oleh karena hal tersebut maka penulis mengangkat judul tentang **“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana *Qardhul Hasan* Guna Optimalisasi Pembiayaan pada *Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung*”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana solusi untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsi strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsi faktor-faktor yang menghambat penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsi solusi dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah pada obyek yang akan di teliti maka perlu adanya batasan masalah, yaitu strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* guna optimalisasi pembiayaan pada BMT Istiqomah Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi referensi bagi

kalangan akademis dan non akademis khususnya pada bidang perbankan syariah.

- b. Sebagai bahan bacaan atau pertimbangan bagi penulis khususnya strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan*.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan* secara optimal.

- b. Bagi Akademik

Agar dapat menambah referensi strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan*. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan studi literatur untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana *qardhul hasan*, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Strategi adalah penentuan dasar goal jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>
- b. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya.<sup>13</sup>
- c. *Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>14</sup>
- d. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>15</sup>
- e. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dibawah

---

<sup>12</sup> Supriono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1985), hal. 8

<sup>13</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 7

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 131

<sup>15</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 2

dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### **2. Bagian Isi**

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- a. BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis.
- c. BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>16</sup> Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, hal. 82

- d. BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.
- e. BAB V Pembahasan, terdiri dari: berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.
- f. BAB VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.